



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS KESEHATAN
Jl. Cendana No.2-3 Kel. MOGOLAING KOTAMOBAGU



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2017



DINAS KESEHATAN
KOTA KOTAMOBAGU
SULAWESI UTARA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa , Allah SWT karena atas rahmat, petunjuk dan anugerah-Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu tahun 2017 yang sesuai dengan format terbaru berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dapat terselesaikan.

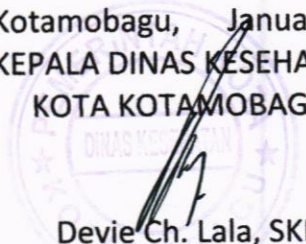
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam INPRES 7/99 tentang mewajibkan setiap instansi pemerintah mulai dari Eselon II keatas untuk melaksanakan akuntabilitas instansi pemerintah dan lebih meningkatkan pemerintahan yang berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab. Adapun pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berdasarkan SK LAN Nomor 239 tahun 2003 dan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Tahun 2017.

Tuntutan akan adanya peningkatan kinerja berarti tuntutan perubahan pola pikir dari aparatur. Karena kinerja pemerintahan akan sangat sulit berubah apabila kita tidak mampu melakukan transformasi sistem pemerintahan dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirauasakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa yang lain, transformasi sektor pemerintahan berarti merubah fokus akuntabilitas dari orientasi kepada masukan-masukan (inputs oriented Accountability), menjadi yang berorientasi kepada hasil (Result Oriented Government).

LKIP Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu ini tidak terlepas dari kekurangan, kesalahan dan kendala-kendala teknis yang dihadapi, namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut melalui pendekatan koordinasi serta asistensi dari berbagai nara sumber yang kompeten.

Semoga LKIP Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Kota Kotamobagu pada tahun- tahun berikutnya.

Kotamobagu, Januari 2018
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA KOTAMOBAGU


Devie Ch. Lala, SKM
NIP. 197212071998031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Bab. I Pendahuluan	1
1.1. Gambaran Organisasi	1
1.1.1. Dasar Hukum Pembentukan SKPD	1
1.1.2. Tugas Pokok pembentukan SKPD	1
1.2. Sumber daya SKPD	3
1.3. Kinerja Pelayanan SKPD	4
1.4. Perumusan Isu isu strategis	4
1.5. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan tantangan	5
Bab. II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	
2. Rencana Strategik	6
2.1. Visi dan Misi	6
2.2. Tujuan	6
2.3. Sasaran	7
Bab. III Akuntabilitas Kinerja	
3. Capaian Kinerja	16
3.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016	16
3.2. Realisasi Anggaran	28
Bab. IV Penutup	
4.1. Saran Tindak Lanjut	34
Lampiran-lampiran :	
PERJANJIAN KINERJA	
TUPOKSI STAF	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum SKPD.

Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas serta sepenuhnya berada dan bertanggung jawab kepada Walikota dengan memperhatikan petunjuk kebijaksanaan yang bersifat teknis baik pusat maupun propinsi.

Dasar hukum Organisasi Dinas Kesehatan diatur dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kotamobagu.

1.1.1. Dasar Hukum pembentukan SKPD.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diamandemen menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 dan yang terakhir dirubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang nomor 4 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu, maka penyelenggaraan desentralisasi dengan otonomi luas di Kota Kotamobagu dimulai. Hakekat undang-undang tersebut adalah pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah termasuk kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Penerapan otonomi daerah menuntut terciptanya *good governance* pada lembaga pemerintah, tak terkecuali lembaga Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu. Konsekuensi dari tuntutan melaksanakan *good governance* pada institusi pelayanan kesehatan adalah bahwa pelayanan kesehatan harus tunduk kepada kontrol politik dan pasar.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

1.1.2. Tugas Pokok Pembentukan SKPD.

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008, kedudukan Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang kesehatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang sepenuhnya berada dan bertanggung jawab kepada Walikota dengan memperhatikan petunjuk kebijaksanaan yang bersifat teknis baik pusat maupun propinsi. Tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan Kebijakan teknis di bidang kesehatan.
- b. Memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan.
- c. Mengadakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Dinas (UPTD) Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Lingkungan Daerah dan Gudang Farmasi serta Perbekalan Kesehatan.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi kepala Dinas Kesehatan adalah :

- a. Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi di bidang Kesehatan, pembinaan sekretariat, pelayanan kesehatan, pencegahan pemberantasan penyakit dan wabah, promosi kesehatan dan penyehatan lingkungan serta perencanaan kesehatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut pada huruf a, Kepala Dinas Kesehatan memiliki fungsi :
 1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Kesehatan;
 2. Memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Kesehatan ;
 3. Mengadakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Lingkungan Daerah, dan Gudang Farmasi dan perbekalan kesehatan;
 4. Mengadakan Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan dinas maupun dengan dinas/badan/bagian lain di luar dinas sesuai dengan Bidang Tugas masing-masing ;
 5. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Walikota tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang Kesehatan;
 6. Penyusunan rencana dan program di bidang Kesehatan berpedoman pada program nasional, RPJMD Provinsi dan Kota dan kebijakan Walikota;

7. Melaksanakan pembinaan umum dan teknis dalam pencapaian program dinas;
8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahunan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan penyusunan program tahun berikut;
9. Melaksanakan rapat konsultasi dengan tiap Bidang, Sekretariat dan staf;
10. Bimbingan dan pengawasan Urusan sekretariat dan Rumah Tangga Dinas
11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota ;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

1.2. Sumber Daya Manusia SKPD.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kotamobagu, kedudukan Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang kesehatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang sepenuhnya berada dan bertanggung jawab kepada Walikota dengan memperhatikan petunjuk kebijaksanaan yang bersifat teknis baik pusat maupun propinsi.

Dinas Kesehatan secara fisik mempunyai wilayah kerja yang terdiri dari 4 Kecamatan dengan 18 Kelurahan dan 15 Desa, jumlah Puskesmas sebanyak 5, Puskesmas Pembantu (Pustu) 8 buah, RSUD 1 buah dan Posyandu 45 buah dengan jumlah Kader aktif sebanyak 330 org.

Organisasi Dinas Kesehatan merupakan sebuah sistem yang terdiri dari elemen-elemen atau bagian yang saling berkaitan dan berinteraksi satu dengan lainnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Kesehatan
2. Sekertariat :
 - a. Sekretaris
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - c. Sub. Bagian Keuangan dan perencanaan
3. Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit :
 - a. Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- c. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
- d. Seksi Kesehatan lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
- 4. Bidang Pelayanan, Promosi dan sumber Daya Kesehatan :
 - a. Kepala Bidang Pelayanan, Promosi dan sumber Daya Kesehatan
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan
 - d. Seksi Sumber Daya Kesehatan

1.3. Kinerja pelayanan SKPD.

Keberadaan organisasi Dinas Kesehatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya dalam mendukung terpeliharanya dan meningkatnya derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Terselenggaranya pelaksanaan pembangunan di daerah yang berwawasan kesehatan.
- b. Terpelihara dan meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat.
- c. Terpeliharanya dan meningkatnya kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungan.
- d. Terwujudnya kemandirian masyarakat untuk melaksanakan hidup bersih dan sehat.

1.4. Perumusan Isu Isu Strtegis.

Peningkatan sumber daya pegawai dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan.

1.5. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan.

Kekuatan yang ada yaitu sumber daya manusia, jumlah pegawai dan tingkat pendidikan yang memadai, dukungan dari pimpinan tertinggi.

Kelemahan yaitu masih kurang peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.

Peluang yaitu peningkatan kompetensi pegawai dan peran serta masyarakat.

Tantangan yaitu perubahan kebijakan stake holder dalam pelaksanaan program-program kegiatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2. Rencana Strategi.

2.1 Visi dan Misi

Dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu harus dengan seksama memperhatikan dasar-dasar pembangunan nasional di bidang kesehatan kesehatan, yaitu:

1. Semua warga negara berhak memperoleh derajat kesehatan yang optimal agar dapat bekerja dan hidup layak sesuai dengan martabat manusia.
2. Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan rakyat.
3. Penyelenggaraan upaya kesehatan diatur oleh pemerintah dan dilakukan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat.

Dengan memperhatikan dasar-dasar pembangunan kesehatan tersebut dan juga mempertimbangkan perkembangan serta masalah, dan kecenderungan yang dihadapi Dinas Kesehatan, maka Visi Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu adalah:

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT DAN PRODUKTIF MENUJU KOTA KOTAMOBAGU YANG SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING".

Dinas Kesehatan diharapkan dapat menjadi penggerak pembangunan kesehatan untuk terwujudnya Kota Kotamobagu Sehat yang mampu membina, dan mengembangkan, serta melaksanakan pembangunan kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mewujudkan Visi *"Terwujudnya Masyarakat Yang Mandiri Untuk Hidup Sehat Dan Produktif Menuju Kota Kotamobagu Yang Sejahtera, Berbudaya Dan Berdaya Saing."* tersebut, maka Misi Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan memberdayakan sumber daya kesehatan secara konsisten dan berkesinambungan
2. Mengupayakan pembangunan di kota Kotamobagu yang berwawasan kesehatan
3. Mendorong kemandirian masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hidup bersih dan sehat.

2.2 Tujuan.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi tersebut diatas, maka Dinas Kesehatan menetapkan Tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat
2. Turunnya kejadian penyakit menular
3. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

2.3 Sasaran.

Untuk mencapai visi misi serta tujuan yang ditetapkan maka sasaran yang akan dicapai Oleh Dinas Kesehatan kurun waktu 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
2. Menurunnya kejadian penyakit menular
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Secara lengkap misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1.
Distribusi Tujuan, Sasaran.

TUJUAN	SASARAN
2	3
1. Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
2. Turunnya kejadian penyakit menular	2. Menurunnya kejadian penyakit menular
3. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu sebagaimana pada tabel 2.1 diatas dijabarkan dalam Rencana Strategi berdasarkan Sasaran dan Indikator Sasaran/Indikator Kinerja Utama Kota Kotamobagu seperti pada tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2
Rencana Strategi 5 (lima) Tahun.

TUJUAN			SASARAN			TARGET					STRATEGI		KET
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	1	2	3	4	5	KEBIJAKAN	PROGRAM	
Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	130/100.000 KH	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	170/100.000 KH	170/100.000 KH	160/100.000 KH	150/100.000 KH	140/100.000 KH	130/100.000 KH			
	Angka Kematian Bayi	10/1000 KH		Angka Kematian Bayi	14/1000 KH	14/1000 KH	13/1000 KH	12/1000 KH	11/1000 KH	10/1000 KH			
	Persentase Balita Gizi Buruk	0,05 %		Persentase Balita Gizi Buruk	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %			
Turunnya kejadian penyakit menular	Persentase penurunan Penderita penyakit menular Demam Berdarah Dengue (DBD)	10%	Menurunnya kejadian penyakit menular	Persentase penurunan penderita penyakit menular Demam Berdarah Dengue (DBD)	10%	10%	15%	20%	25%	30%			
	Persentase Penanggulangan kejadian Luar Biasa < 24 jam	80%		Persentase penanggulangan kejadian Luar Biasa < 24 jam	80%	80%	85%	90%	95%	100 %			
Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase temuan BPK yang di tindak lanjuti		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase temuan BPK yang di tindak lanjuti	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu dapat di lihat sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR	PENJELASAN / FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Angka Kematian Ibu	Banyaknya kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dikali 100.000	Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu	Bidang Kesmas dan P3
Angka Kematian Bayi	Banyaknya kematian bayi (di bawah 1 Th) selama tahun tertentu dibagi banyak kelahiran hidup pada waktu tertentu dikali 1000	Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu	Bidang Kesmas dan P3
Persentase Balita Gizi Buruk	Jumlah balita gizi buruk yang dirawat dibagi jumlah balita gizi buruk yang ditemukan dikali 100 %	Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu	Bidang Kesmas dan P3
Persentase penurunan penderita penyakit menular Demam Berdarah Dengue (DBD)	Jumlah Penderita DBD tahun lalu dikurang dengan jumlah penderita DBD tahun sekarang dibagi dengan jumlah penderita DBD tahun lalu dikali 100 %	Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu	Bidang Kesmas dan P3
Persentase penanggulangan Kejadian Luar Biasa < 24 jam	Jumlah KLB yang di tangani <24 jam di bagi jumlah seluruh KLB di kali 100 %	Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu	Bidang Kesmas dan P3
Persentase temuan BPK yang di tindak lanjuti	Jumlah temuan BPK yang di tindak lanjuti di bagi seluruh temuan BPK dikali 100 %	Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu	Sekretaris

Adapun rencana kerja Dinas kesehatan Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut

Tabel 2.4
Rencana Kerja Tahunan

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	VOLUME	LOKASI	ANGGARAN
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita			
1. Kelas Ibu Balita	1. Kelas Ibu Balita	50	4 Kecamatan	12700000

2. Skrining Hipotyroid Kongenotal (SHK)	2. Skrining Hipotyroid Kongenotal (SHK)	135 Orang	4 Kecamatan	127550200
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak			
1. Perawatan secara berkala bagi ibu hamil keluarga tidak mampu	1. Perawatan secara berkala bagi ibu hamil keluarga tidak mampu	88	4 Kecamatan	81770000
2. Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga tidak mampu	2. Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga tidak mampu	93	4 Kecamatan	3300000
3. Jaminan Persalinan	3. Jaminan Persalinan	85	4 Kecamatan	552547000
4. Pengembanagan desa/kelurahan dengan Program Perencanaan Persalinan Pencegahan Komplikasi	4. Pengembanagan desa/kelurahan dengan Program Perencanaan Persalinan Pencegahan Komplikasi	5	4 Kecamatan	18486600
Program Perbaikan Gizi Kesehatan Masyarakat	Program Perbaikan Gizi Kesehatan Masyarakat			
1. Penanggulangan KEP, Anemia Gizi, GAKY, KVA dan Kekurangan Gizi Mikro Lainnya	1. Penanggulangan KEP, Anemia Gizi, GAKY, KVA dan Kekurangan Gizi Mikro Lainnya	75	4 Kecamatan	31582400
2. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	2. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	20	4 Kecamatan	35785200
3. Sosialisasi pedoman pemberian tablet Fe ibu hamil integrasi KIA dan pedoman pemantauan garam beryodium di tingkat rumah tangga (RT)	3. Sosialisasi pedoman pemberian tablet Fe ibu hamil integrasi KIA dan pedoman pemantauan garam beryodium di tingkat rumah tangga (RT)	50	4 Kecamatan	24292950
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			
1. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	1. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	60	4 Kecamatan	31.700.000
2. Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	2. Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	2	4 Kecamatan	32.150.000
3. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	3. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	90	4 Kecamatan	83.703.050
4. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	4. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	99	4 Kecamatan	217.127.100
5. Peningkatan imunisasi	5. Peningkatan imunisasi	88	4 Kecamatan	81.742.950
6. Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	6. Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	100	4 Kecamatan	59.768.850
Program Peningkatan	Program Peningkatan			

Pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10	Dinkes	38.600.000

Berdasarkan Rencana Kerja Tahunan diatas Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu menetapkan Perjanjian Kinerja berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Perjanjian kinerja tahun 2017
Dinas kesehatan kota kotamobagu

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	140/100.000 KH
	Angka Kematian Bayi	11/1000 KH
	Persentase Balita Gizi Buruk	0,05%
Menurun nya kejadian penyakit menular	Persentase penurunan penderita penyakit menular Demam Berdarah Dengue (DBD)	25 %
	Persentase penanggulangan kejadian Luar Biasa < 24 jam	95 %
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase temuan BPK yang di tindak lanjuti	100 %

Untuk pencapaian indicator kinerja sasaran di atas akan dilaksanakan melalui beberapa program sebagaimana tabel 2.6 dibawah ini :

Tabel 2.6
Program Dinas kesehatan kota kotamobagu Tahun 2017

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	140.250.200	

No	Program	Anggaran	Keterangan
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	656.103.600	
	Program Peningkatan Gizi Kesehatan Masyarakat	91.660.550	
2	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	506.191.950	
3	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	38.600.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3. Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja dapat di nilai melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja di lakukan dengan menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di tetapkan dalam Rencana Strategis dan rencana kerja tahunan. Selain itu pengukuran kinerja mencakup pula beberapa capaian kinerja yang dapat di perbandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dan perbandingan kinerja actual dengan standar pelayanan minimal (SPM) serta perbandingan kinerja tahun berjalan dengan rencana akhir jangka menengah.

Perhitungan persentase pencapaian kinerja :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin **baik**, dengan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin **rendah** pencapaian kinerja, dengan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Selanjutnya penilaian dari capaian kinerja di bagi berdasarkan skala nilai dan kategori penilaian seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

SKALA NILAI	KATEGORI PENILAIAN
➤ 100	Sangat Baik
80 - 100	Baik
➤ 55 - 80	Sedang
< 55	Kurang

3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017, maka target dan realisasi pencapaian sasaran strategis berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2017.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu melahirkan	140/100.000 KH	188/100.000 KH	65 %
	Angka Kematian Bayi	11/1000 KH	8,78/1000 KH	120,18 %
	Persentase Balita Gizi Buruk	0,05 %	0,04 %	120 %
Menurunnya kejadian penyakit menular	Persentase penurunan penderita penyakit menular Demam Berdarah Dengue (DBD)	25 %	80 %	320 %
	Persentase penanggulangan kejadian Luar Biasa < 24 jam	95 %	100 %	105 %
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase temuan BPK yang di tindak lanjuti	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan Tabel 3.1 diatas capaian kinerja masing – masing sasaran berdasarkan indikatornya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1, **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**

Tabel 3.1.1
Capaian kinerja sasaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu melahirkan	140/100.000 KH	188/100.000 KH	65 %
	Angka Kematian Bayi	11/1000 KH	8,78/1000 KH	120,18 %
	Persentase Balita Gizi Buruk	0,05 %	0,04 %	120 %
	Rata rata			101,72 %

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat terdapat 2 indikator dengan nilai sangat baik, dan 1 indikator bernilai sedang. Perbandingan rata-rata capaian kinerja tahun 2016 sebesar 129,10%, mengalami penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 101,72 %. Akan tetapi rata-rata capaian kinerja sasaran ini masih bernilai sangat baik

Capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dicapai dengan 3 indikator sasaran yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pencapaian indikator Sasaran Angka Kematian Ibu melahirkan Jumlah kasus kematian ibu (ibu hamil, bersalin dan nifas) di Kota Kotamobagu pada tahun 2016 sebesar 3 (tiga) orang dari jumlah kelahiran hidup sebesar 1874. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah kasus kematian ibu tetap yaitu sebesar 3 (tiga) orang dari jumlah kelahiran hidup sebanyak 1.593 kelahiran hidup. Berdasarkan target tahun 2017 sebesar 140/100.000 kelahiran hidup dan realisasi kinerja 188/100.000 kelahiran hidup maka tingkat capaian kinerja pada indikator ini sebesar 65 % atau bernilai sedang.

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu yaitu dengan membentuk kelompok kelas ibu hamil, peningkatan kompetensi bidan dalam asuhan persalinan normal dan program suami SIAGA.

Realiasi kinerja sebesar 188/100.000 kelahiran hidup dibandingkan dengan pencapaian target akhir tahun Renstra sebesar 130/100.000 kelahiran hidup, maka tingkat capaian kinerja hingga tahun 2017 sebesar 55 %

Pencapaian sasaran ini dilakukan dengan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Rp. 656.103.600.

- Pencapaian Indikator Sasaran Angka Kematian Bayi Jumlah kasus kematian bayi di Kota Kotamobagu tahun 2016 sebanyak 16 kematian bayi dari jumlah kelahiran hidup sebesar 1.874 Kelahiran Hidup (KH). Mengalami penurunan di tahun 2017 dimana angka kematian bayi sebesar 14 dari jumlah kelahiran hidup 1.593 Kelahiran Hidup. Berdasarkan target tahun 2017 sebesar 11/1000 KH, dengan realisasi kinerja sebesar 8,78/1000 KH maka tingkat capaian kinerja pada indikator ini sebesar 120,18 % atau bernilai sangat baik. Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 8,78/1000 KH dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra sebesar 10/1000 per kelahiran hidup maka tingkat capaian kinerja tahun 2017 terhadap tahun akhir Renstra 112,2% dan sudah tercapai sehingga nantinya diadakan revisi terhadap target pada indikator ini. Pencapaian sasaran ini dilakukan dengan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Rp. 140.250.200.

- **Pencapaian Indikator Sasaran Persentase Balita Bergizi Buruk**

Pada tahun 2016 Kota Kotamobagu terdapat 3 kasus balita gizi buruk usia 0 - 59 bulan dari jumlah 9.188 sasaran balita usia 0 – 59 bulan yang tercatat. Sedangkan di tahun 2017 kasus balita gizi buruk usia 0 – 59 bulan sebesar 4 kasus dari jumlah 10.658 sasaran balita usia 0 – 59 bulan. Dari penderita kasus gizi buruk tahun 2016 dan 2017 semuanya mendapatkan perawatan dan intervensi tindakan dan anggaran dari Pemerintah Kota Kotamobagu.

Apabila di bandingkan dengan target indikator tahun 2016 sebesar 0,05%, dengan realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 0,037 % maka capaian kinerja tahun 2017 adalah 120 % dan bernilai sangat baik.

Dalam pencapaian target indikator ini terdapat dukungan kemitraan lintas program dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lintas sektor serta peran pemberdayaan masyarakat.

Kendala yang dihadapi dari pencapaian target indikator ini adalah :

- Kelainan Kongenital dan bibir sumbing
- Pola asupan gizi yang salah
- Adanya sindrom pada penderita gizi buruk

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target indikator ini adalah:

- Pelacakan kasus gizi buruk.
- Pendampingan Balita gizi kurang.
- Pemberian suplemen gizi.
- Pemberian makanan tambahan untuk pemulihan gizi buruk.

Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 0,04 % dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra yaitu sebesar 0,05 %, maka pencapaian kinerja pada tahun 2017 sudah melampaui dari target akhir Renstra sehingga perlu merevisi target Renstra.

Upaya Dinas Kesehatan dalam menekan angka kematian bayi yaitu:

1. Meningkatkan akses kesehatan ibu dan anak khususnya pada masa persalinan dan pasca persalinan.
2. Memperkuat Mutu Manajemen Terpadu Penyakit Bayi Dan Balita.
3. Memperbaiki dan meningkatkan kesehatan lingkungan termasuk air bersih dan sanitasi.
4. Pengendalian penyakit menular dan gizi yang cukup.

Pencapaian sasaran ini dilakukan dengan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp. 91.660.550

Sasaran 2, **Menurunnya Kejadian Penyakit Menular**

Tabel 3.1.2
Capaian kinerja sasaran 2

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	5
Menurunnya kejadian penyakit menular	Persentase penurunan penderita penyakit menular Demam Berdarah Dengue (DBD)	25 %	80 %	320 %
	Persentase penanggulangan kejadian Luar Biasa < 24 jam	95 %	100 %	105 %
	Rata rata			212,5 %

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran Menurunnya kejadian penyakit menular terdapat 2 indikator dengan nilai sangat baik semuanya. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 212,5 %.

Capaian kinerja pada sasaran Menurunnya kejadian penyakit menular dicapai dengan 2 indikator sasaran yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pencapaian indikator Persentase penurunan penderita penyakit menular Demam Berdarah (DBD) :

Jumlah kasus DBD di Kota Kotamobagu pada tahun 2016 sebesar 224 orang. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah kasus DBD yaitu sebesar 45 orang. Berdasarkan target tahun 2017 sebesar 25 % dan realisasi kinerja 80 % maka tingkat capaian kinerja pada indikator ini sebesar 320 % atau bernilai sangat baik.

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan kejadian penyakit menular penderita penyakit menular Demam Berdarah (DBD) ;

- ✓ Melakukan promosi kesehatan, dengan cara penyuluhan ke desa dan kelurahan pentingnya pemberantasan sarang nyamuk.
- ✓ Respon cepat petugas kesehatan melalui penyelidikan epidemiologi dan tindak lanjut
- ✓ Waspada demam berdarah, melalui laporan kader kesehatan mengenai kasus demam berdarah dengue

Realiasi kinerja sebesar 80 % dibandingkan dengan pencapaian target akhir tahun Renstra sebesar 30 %, maka tingkat capaian kinerja hingga tahun 2017 sebesar 266,66 %

- Pencapaian Indikator Sasaran Persentase penanggulangan kejadian Luar Biasa <24 jam.

Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kota Kotamobagu tahun 2017 yaitu sebesar 45 Kasus. Dari jumlah 45 kasus KLB semua dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam atau 100 %. Berdasarkan target tahun 2017 sebesar 95 %, dengan realisasi kinerja sebesar 100 % maka tingkat capaian kinerja pada indikator ini sebesar 105 % atau bernilai sangat baik.

Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 100 % dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra sebesar 100 % maka tingkat capaian kinerja tahun 2017 terhadap tahun akhir Renstra 100 % dan sudah tercapai sehingga nantinya diadakan revisi terhadap target pada indikator ini.

Pencapaian sasaran ini dilakukan dengan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan anak Rp. 506.191.950.

Sasaran 3, **Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi**

Tabel 3.1.3

Capaian kinerja sasaran 3

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase temuan BPK yang di tindak lanjuti	100 %	100 %	100 %
	Rata rata			100 %

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi terdapat 2 indikator dengan nilai sangat baik semuanya. Perbandingan rata-rata capaian kinerja tahun 2016 tahun 2017 sama yaitu 100 %. Rata-rata capaian kinerja sasaran ini masih bernilai sangat baik

Capaian kinerja pada sasaran Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dicapai dengan 2 indikator sasaran yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pencapaian Indikator Sasaran Persentase temuan BPK yang di tindak lanjuti. temuan BPK di dinas kesehatan Kota kotamobagu tahun 2016 tidak ada temuan BPK di tahun 2017 ada temuan BPK yaitu sebanyak 4 temuan. Semua temuan di tindak lanjuti. Berdasarkan target tahun 2017 sebesar 100 %, dengan realisasi kinerja sebesar 100 % maka tingkat capaian kinerja pada indikator ini sebesar 100 % atau bernilai sangat baik.

Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 100 % dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra sebesar 100 % maka tingkat capaian kinerja tahun 2017 terhadap tahun akhir Renstra 100 % sudah terpenuhi.

3.2 Realisasi Anggaran.

Realisasi anggaran tahun 2017 dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.
Realisasi Anggaran SKPD Tahun 2017.

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Target		Realisasi Anggaran	
					Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita							
1	Jumlah Kelas Ibu	50	Kelas Ibu Balita	12.700.000	50	100,00%	12.700.000	100,00%
2	Jumlah orang yang mengikuti SHK	135	Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)	127.550.200	135	100,00%	108.064.320	84,72%
II	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak							
3	Cakupan Bumil Mendapatkan Pelayanan ANC (K4)	88	Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu	81.770.000	88	100,00%	80.915.700	98,96%
4	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (PN)	93	Jaminan Persalinan	3.300.000	93	100,00%	3.300.000	100,00%
5	Jumlah ibu yang mendapat pertolongan persalinan	85	Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu	552.547.000	110	129,41%	266.129.049	48,16%

6	Jumlah Desa / Kelurahan	5	Pengembangan Desa/Kelurahan dengan Program Perencanaan Persalinan Pencegahan Komplikasi (P4K)	18.486.600	5	100,00%	18.477.900	99,95%
III	Program Peningkatan Gizi Kesehatan Masyarakat							
7	Cakupan Balita yang ditimbang berat badannya	75	Penanggulan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	31.582.400	75	100.00%	31.582.250	100,00%
8	Jumlah kelompok Kadarzi	20	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	35.785.200	20	100.00%	35.784.900	100,00%
9	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi	50	Sosialisai pedoman pemberian tablet Fe ibu hamil integrasi Gizi dan KIA dan Pedoman Pemantauan garam beryodium di tingkat Rumah Tangga (RT)	24.292.950	50	100.00%	24.292.950	100,00%
IV	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
10	Jumlah Fokus yang di fogging (1 Fokus x 2 Siklus)	60	Penyemprom/fogging sarang nyamuk	31.700.000	60	100,00%	31.700.000	100,00%

11	Jumlah Alat & Bahan Fogging	2	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	32.150.000	2	100,00%	32.150.000	100,00%
12	Cakupan BIAS	90	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	83.703.050	90	100,00%	83.186.950	99,38%
13	Jumlah jenis penyakit	99	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	217.127.100	99	100,00%	216.377.100	99,65%
14	Cakupan Imunisasi	88	Peningkatan imunisasi	81.742.950	88	100,00%	81.101.950	99,22%
15	Jumlah Laporan Penyelidikan Epidemiologi	100	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	59.768.850	100	100,00%	57.363.850	95,98%
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
16	Jumlah dokumen/laporan capaian kinerja SKPD yang disusun	10 Laporan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	38.600.000	10	100,00%	37.552.000	97,28%

BAB IV PENUTUP

4. Penutup.

Desentralisasi kesehatan merupakan salah satu dari tugas dan kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu sektor kesehatan merupakan urusan pemerintah daerah yang harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakatnya.

Kinerja Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu tahun 2017 yang tertuang dalam sasaran kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan Indikator Kinerja yaitu Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Persentase Balita Gizi Buruk.

Intervensi dari sasaran kinerja dan indikator kinerja yaitu dengan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita, Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, dan Program Peningkatan Gizi Kesehatan Masyarakat.

Adapun realisasi capaian indikator kinerja pada tahun 2017 adalah sbagai berikut :

- | | | |
|---------------------------------|------------|---------------|
| 1. Angka Kematian Ibu | = 65 % | (sedang) |
| 2. Angka Kematian Bayi | = 120,18 % | (sangat baik) |
| 3. Persentase Balita Gizi Buruk | = 120 % | (sangat baik) |

Dari hasil tersebut diatas dapat di simpulkan bahwa capaian indikator kinerja angka kematian ibu belum tercapai.

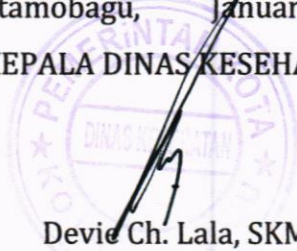
1.1. SARAN TINDAK LANJUT

Melihat hasil capaian indikator kinerja angka kematian ibu belum tercapai maka perlu tindak lanjut untuk memaksimalkan dengan memperhatikan program tersebut pada perencanaan berikutnya dan mempertahankan hasil yang sudah terpenuhi realisasi target sarannya.

Demikian penulisan dan penyampaian Laporan kinerja Instansi Pemerintah, untuk itu dengan segala keterbatasan yang ada, kami sangat mengharapkan petunjuk lebih lanjut guna penyempurnaan dan ketepatan penyampaian laporan pada tahun berikutnya.

Kotamobagu, Januari 2018.

KEPALA DINAS KESEHATAN



Devie Ch. Lala, SKM
NIP. 197212071998031003